

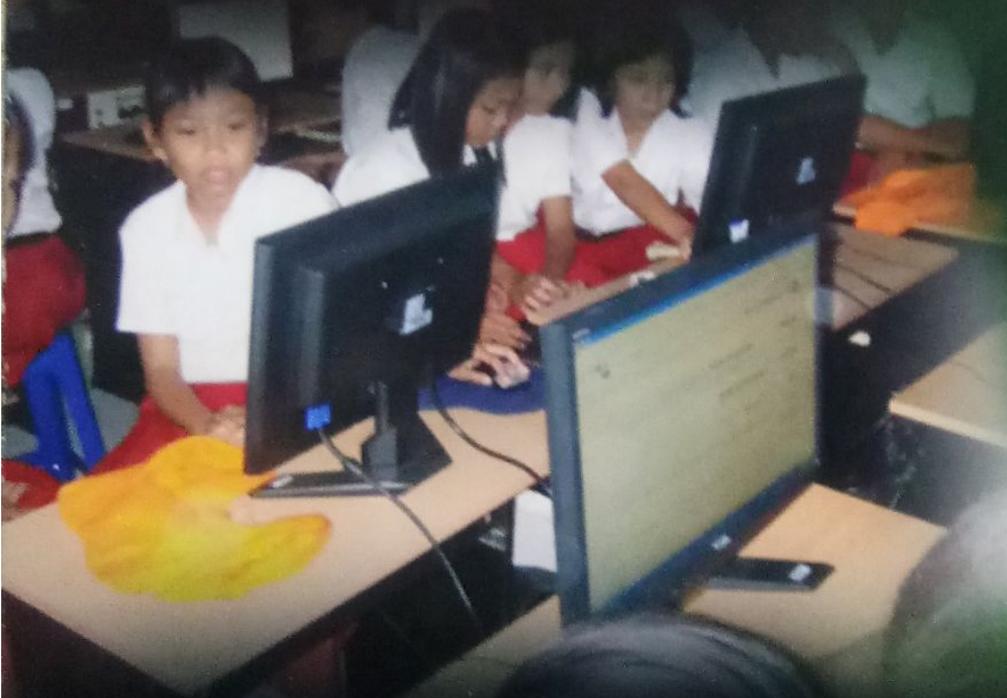
VOL. 2 | No. 02 | Agustus 2010

ISSN: 2085-4641

Literasi

JURNAL REFORMASI PENDIDIKAN

Menakar Efektivitas Program Pembangunan Bidang Pendidikan



DEWAN PENDIDIKAN
PROPINSI JAWA TIMUR

Literasi

JURNAL REFORMASI PENDIDIKAN

Pemimpin Umum
Prof. Dr. Zainuddin Maliki, MS

Penanggungjawab
Ketua Dewan Pendidikan
Provinsi Jawa Timur

Dewan Redaksi
Prof. Anita Lie, Ed.D,
Prof. Dr. Sam Abede Pareno,
Daniel M. Rosyid, Ph.D,
Prof. Dr. Joko Saryono, M.Ed,
Prof. Dr. Roesminingsih, P.Pd,
Budi Iswanto, MA, Ph.D,
Prof. Dr. Shonhaji Sholeh,
Prof. Dr. Yatim Riyanto,
dan Prof. Dr. Gempur Santoso

Pemimpin Redaksi
Dr. Eny Haryati

Wakil Pemimpin Redaksi
Ir. Daniel Rohi, M.Eng.Sc

Redaksi Pelaksana
Drs. Bagong Suyanto, M.Si,
Drs. Maksum, M.Si,
Drs. B. Soeprapto, M.Si,
Salamun, Ph.D,
Drs. F.J. Siswanto,
Drs. Zaenal Arifin, MA,
Sulistiyanto Suyoso,
DR. H. Marheany Djumadi, SE, MM,
Drs. Joko Adi Waluyo, ST, MM,
DR. V. Luluk Prijambodo, M.Pd

Produksi dan Pemasaran
Dra. Gadis Agung Prasmono
Drs. Wirawan

LITERASI, Jurnal Reformasi Pendidikan, diterbitkan oleh Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur, tiga kali dalam setahun: Maret, Juli, dan November

Alamat:
Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya
Telpun (031) 3811966
Fax (031) 3813096
E-mail: jurnal_literasi@yahoo.com

PENGANTAR REDAKSI

Upaya untuk memajukan pendidikan sesungguhnya bukan hanya tanggungjawab pemerintah pusat, tetapi juga menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. Ketika kebijakan desentralisasi pendidikan digulirkan dan daerah memegang tongkat estafet untuk terus menghela kemajuan dan kualitas pendidikan, maka inisiatif dan komitmen pimpinan di tingkat provinsi, kota dan kabupaten untuk memajukan pendidikan menjadi sangat penting.

Dalam Edisi Kedua, Volume II, Agustus Tahun 2010 ini, LITERASI sengaja mengangkat topik utama tentang efektivitas pelaksanaan program pembangunan bidang pendidikan di daerah. Di era otonomi daerah, perlu disadari bahwa tanggung untuk mencerdaskan masyarakat dan memajukan pendidikan kini ada di tangan Pemerintah Daerah, dan sudah sewajarnya jika daerah terus berkomitmen untuk mengembangkan program-program yang inovatif dan kreatif untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan.

Selain mengangkat topik utama tentang inisiatif daerah dalam program pembangunan bidang pendidikan, Literasi kali ini juga mengangkat berbagai gagasan menarik yang berkaitan dengan upaya untuk terus memajukan kualitas pembelajaran dan pendidikan.

Harapan kami semoga, LITERASI Edisi Kedua Tahun 2010 ini dapat menggugah perhatian pembaca, khususnya kalangan pendidikan agar lebih peka dan dapat memperoleh ilham untuk mengembangkan proses pembelajaran yang benar-benar berbasis kepada kepentingan terbaik peserta didik. Selamat membaca dan berkarya.

LITERASI diterbitkan sebagai media informasi, diskusi dan sosialisasi masalah pendidikan, khususnya di Propinsi Jawa Timur. Berisi tulisan ilmiah populer, ringkasan hasil penelitian, dan berbagai gagasan yang kritis. Redaksi mengundang para ahli, peminat, praktisi dan cendekiawan yang berbakat untuk berdiskusi dan menulis secara kreatif persoalan pendidikan di Jawa Timur. Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya.

DAFTAR ISI

TOPIK UTAMA

- (1) EVALUASI PELAKSANAAN BOPDA DI KOTA SURABAYA
Septi Ariadi 1
- (2) PROBLEMA BIDANG PENDIDIKAN
DI WILAYAH KEPULAUAN KABUPATEN SUMENEP
Bagong Suyanto 21
- (3) KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DI ERA
DESENTRALISASI PENDIDIKAN
Rahma Sugihartati 42
- (4) ENTERTAINMENISASI SEKOLAH, PSB DINI,
HINGGA PARENTING TEST
Drs. Jidi, M.Si. 61

GAGASAN

- (1) PENDIDIKAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF DURKHEIMIAN
Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si. 68
- (2) ADAM SMITH DAN PERSPEKTIF LIBERAL
DALAM PENDIDIKAN
Dra. Sudarmi 78
- (3) *SKILLED LABOUR* DALAM KONTEKS TKI
Sam Abede Pareno 84
- (4) PENDIDIKAN MORAL DAN KETELADANAN
Kusmin 88

KAJIAN

- (1) KEPEKAAN SISWA TERHADAP PERSOALAN LINGKUNGAN
Sari Oktafiana, S.Sos 97

ESSAY

- (1) AKAL SEHAT SEPUTAR PENDIDIKAN GRATIS
Sinung D. Kristanto 110

EVALUASI PELAKSANAAN BOPDA DI KOTA SURABAYA

Septi Ariadi

Sekretaris Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga

Di tengah kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih dari situasi krisis, salah satu masalah sosial yang menjadi fokus perhatian pemerintah, tak terkecuali Pemerintah Kota Surabaya adalah bagaimana menjamin kelangsungan pendidikan anak, minimal hingga jenjang pendidikan dasar. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah diamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Sedangkan dalam ayat 3 disebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Ini berarti Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Dewasa ini, upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menjamin kelangsungan pendidikan dan sekaligus menyediakan layanan pendidikan dasar bagi anak-anak

usia 7-15 tahun adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Biaya Khusus Siswa Miskin (BKSM). Program BOS sendiri ini telah digulirkan sejak tahun 2005, dan pada tahun 2009 disempurnakan lagi dengan sejumlah perbaikan. Pelaksanaan Program BOS mulai tahun 2009 tidak lagi hanya berperan untuk mempertahankan Angka Partisipasi Kasar (APK), namun juga harus berkontribusi besar untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar.

Di Kota Surabaya, salah satu peran yang telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk membantu kelangsungan pendidikan anak-anak adalah program BOPDA (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah). Program ini digulirkan sebagai program dan dana pendamping dari program BOS dan BKSM, yang intinya bertujuan sama, yaitu menjamin kelangsungan pendidikan anak, khususnya siswa miskin agar tidak putus sekolah di tengah jalan. Dalam Peraturan Walikota Surabaya No. 6 Tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Biaya Operasional Pendidikan adalah sejumlah anggaran yang disediakan Pemerintah Kota Surabaya, yang diperuntukkan bagi Sekolah Dasar Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN),

Sekolah Menengah Pertama Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dalam rangka pendampingan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Sekolah Menengah Atas Negeri, Madrasah Aliyah Negeri (MAN), dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dalam rangka pendampingan Program Biaya Khusus Siswa Miskin (BKSM).

Bagi siswa atau anak-anak dari keluarga miskin, kehadiran program BOS, BKSM dan BOPDA ini tentu sangat strategis, karena kita tahu bahwa imbas situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan telah menyebabkan kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan sedikit-banyak terhambat. Pertama, akibat krisis ekonomi, kita tahu bahwa akses atau kesempatan anak-anak dari keluarga miskin untuk memperoleh pelayanan publik di bidang pendidikan jelas akan makin berkurang, dan bahkan tidak mustahil sama sekali pupus karena mereka terpaksa masuk dalam situasi yang teramat sulit dan dilematis antara meneruskan sekolah ataukah membantu orang tua untuk menutupi kebutuhan hidup yang makin mencekik akibat situasi krisis. Kedua, bersamaan dengan terjadinya gelombang anak putus sekolah dan tingginya angka siswa yang tidak meneruskan ke jenjang SLTP, tidak mustahil akan menyebabkan anak-anak dari keluarga miskin potensial terpuruk dalam kondisi hubungan kerja yang merugikan, eksploitatif, dan bahkan tidak menutup kemungkinan mereka terpaksa terperangkap pada kegiatan produktif atau sektor-sektor yang sesungguhnya sangat tidak dapat ditoleransi (*most intolerable forms of child*

labour). Ketiga, terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan bukan tidak mungkin menyebabkan batas toleransi terhadap kasus-kasus eksploitasi dan pelibatan anak-anak miskin dalam kegiatan produktif menjadi makin longgar, sebab situasi dan kondisi yang ada dinilai sebagai faktor pendorong yang tak terelakkan.

Menurut ketentuan yang berlaku, besaran anggaran biaya operasional pendidikan untuk masing-masing sekolah ditentukan berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar pada sekolah penerima BOPDA. Khusus untuk SMA dan MAN, besaran biaya operasional pendidikan ditentukan berdasarkan jumlah siswa miskin yang terdaftar pada masing-masing SMAN dan MAN. Yang dimaksud siswa miskin adalah siswa yang memiliki Kartu Identitas Keluarga Miskin (KIKM) atau Surat Keterangan Miskin (SKM) yang diperoleh sesuai ketentuan yang berlaku.

Di Kota Surabaya, menurut catatan jumlah dana BOPDA yang telah disalurkan pada tahun 2008 sebesar Rp. 204.870.429.000 dan yang terserap sebanyak Rp. 191.574.338.158 (93,51%), sehingga masih tersisa Rp. 13.296.090.842. Untuk tahun 2009, alokasi dana BOPDA yang disalurkan ke berbagai sekolah naik menjadi Rp. 290.712.060.002, tetapi lagi-lagi karena alasan administratif di tahun 2009 hanya terserap Rp. 272.272.852.289 (93,66%) sehingga kembali tersisa sebesar Rp. 18.439.207.713. Secara rinci, berapa alokasi anggaran atau *unit cost* untuk masing-masing siswa per bulan adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Unit Cost BOS dan BOPDA Per Siswa Per Bulan

Keterangan	BOS		BOPDA	
	2008	2009	2008	2009
SD/MI	21.166,66	33.333,33	29.000	29.000
SDLB	21.166,66	33.333,33	29.000	29.000
SMP/MTs	29.500	47.916,66	70.500	70.500
SMPLB	29.500	47.916,66	70.500	70.500
SMPT	29.500	47.916,66	70.500	70.500
SMA/MA	0	0	150.000	150.000
SMK	0	0	152.000	152.000

Di atas kertas, penyaluran berbagai bantuan untuk menjamin kelangsungan pendidikan anak, khususnya siswa miskin tentu diharapkan akan dapat memberikan manfaat yang benar-benar maksimal bagi anak-anak dari keluarga miskin dan anak-anak pada umumnya. Tetapi, layaknya program pembangunan yang lain, untuk menakar sejauhmana efektivitas dari program BOPDA benar-benar memberikan manfaat sebagaimana diharapkan, tentu yang dibutuhkan adalah evaluasi yang mendalam dan objektif. Meski sepintas pelaksanaan program BOPDA disebut-sebut telah

memberikan manfaat yang nyata untuk membantu menjamin kelangsungan pendidikan anak-anak miskin. Namun demikian, sesungguhnya bisa dikaji lebih jauh sejauhmana pemberian BOPDA tersebut terbukti signifikan.

1. Metode

Dalam studi yang dilakukan, paling-tidak telah dilakukan empat proses pengumpulan data. Pertama, tim peneliti mengumpulkan data sekunder tentang kondisi dan kinerja pembangunan bidang pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program BOPDA di Kota Surabaya.

Tabel 2
Lokasi Studi dan Jumlah Siswa

Sekolah	Status	Akreditasi	Penerimaan Bopda	Jumlah siswa	
				Laki-laki	Perempuan
SMAN 1 Surabaya	Negeri	A	6 kali	280	397
SDN Ketabang 1	Negeri	A	7 kali	447	446
SDN WONOKUSUMO 1	Negeri	B	17 kali	234	230
SMPN 1 Surabaya	Negeri	A	4 kali	220	235
SMAN 4	Negeri	A	2 kali	385	525
SMPN 9	Negeri	A	5 kali	381	429
SDN Kertajaya 12	Negeri	A	2 kali	553	502
SMA 11 Surabaya	Negeri	A	7 kali	327	521
SDN Tandus Lor 1	Negeri	B+	7 kali	220	250
SMPN 26	Negeri	A	7 kali	488	583
SMPN 10	Negeri	A	6 kali	454	503
SMAN 18 Surabaya	Negeri	A	6 kali	282	383
SDN Pakis III	Negeri	B	12 kali	362	228
SMPN 31	Negeri	A	4 kali	220	235
SMAN 3	Negeri	A	2 kali	385	525

Kedua, melakukan proses pengumpulan data primer ke berbagai sekolah untuk mewawancarai siswa, guru dan Kepala Sekolah terhadap efektivitas pelaksanaan Program BOPDA di lingkungan masing-masing. Proses pengumpulan data primer dilakukan di sejumlah sekolah sebagai sampel lokasi evaluasi. Sejumlah sekolah yang dijadikan lokasi sampel evaluasi, mulai dari jenjang SD, SMP dan SMA atau satuan pendidikan lain yang sederajat. Jumlah responden yang diwawancarai diperoleh sebanyak 225 siswa, 30 guru, dan 15 Kepala Sekolah.

Ketiga, melakukan proses pengumpulan data dengan cara melakukan *indepth interview* kepada sejumlah informan kunci.

Keempat, melakukan FGD untuk memperoleh masukan dari *stakeholder* terkait tentang kendala pelaksanaan BOPDA dan upaya perbaikan yang dapat dilakukan ke depan.

2. Pelaksanaan Program BOPDA

Hibah Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) adalah alokasi dana yang diberikan Pemerintah Kota Surabaya kepada berbagai sekolah negeri maupun swasta dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin dan sekaligus meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang dikembangkan di sekolah. Program BOPDA ini dirancang dan digulirkan Pemerintah Kota Surabaya, karena disadari bahwa dana BOS yang dikucurkan pemerintah pusat ternyata belumlah cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan sekolah secara maksimal.

Secara teoritis, kita tahu bahwa alokasi dana dan pelaksanaan program BOPDA di Kota Surabaya, sesungguhnya tidak hanya bertujuan untuk membantu kelangsungan pendidikan anak-anak yang secara ekonomi kurang mampu, tetapi juga bertujuan untuk mendorong upaya

peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah sekaligus mencegah terjadinya proses komersialisasi dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Surabaya.

Meski tidak semua sekolah mempraktikkan cara-cara yang sifatnya kapitalistik, namun ada indikasi bahwa dalam beberapa tahun terakhir penyelenggaraan pendidikan di Kota Surabaya, sedikit-banyak telah terkontaminasi oleh kepentingan yang sifatnya pragmatis dan ekonomis.

Bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin, ketika biaya pendidikan makin mahal dan di luar jangkauan kemampuan orang tuanya, maka pada akhirnya tidak lagi pilihan yang bisa diambil. Seorang anak miskin, agar tetap dapat terjamin kelangsungan pendidikannya, maka yang dibutuhkan tak pelak adalah intervensi atau uluran tangan dari pihak lain, termasuk uluran bantuan dari pemerintah daerah.

Di Surabaya, kita tahu sejak situasi krisis melanda negeri ini, dan efek domino yang ditimbulkan sedikit-banyak mengancam kelangsungan pendidikan anak, maka mau tidak mau pemerintah daerah harus ikut ambil bagian mengantisipasi dampak yang tidak diinginkan. Dengan mengucurkan dana Bopda ke berbagai sekolah, tujuan yang ingin diraih Pemerintah Kota Surabaya adalah sejauh memungkinkan dapat mencegah anak-anak putus sekolah, minimal hingga mereka lulus dari jenjang pendidikan dasar 9 tahun.

Memang, alokasi bantuan dan kucuran dana Bopda yang diberikan

Pemerintah Kota Surabaya tidak langsung diterima siswa dalam bentuk beasiswa yang mereka bisa langsung gunakan untuk membeli buku, membeli seragam sekolah atau kepentingan yang lain. Namun demikian, bukan berarti siswa sama sekali tidak memperoleh manfaat dari kucuran dana Bopda ini. Harapan Pemerintah Kota Surabaya, dengan memberikan dana Bopda kepada berbagai sekolah, maka sekolah diharapkan akan dapat menterjemahkannya dalam bentuk kegiatan dan kebutuhan sekolah yang benar-benar kontekstual, berpihak kepada kepentingan peserta didik, dan sekaligus mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

Apakah harapan Pemerintah Kota di atas benar telah terealisasi dalam kenyataan? Benarkah dengan menyalurkan dana BOPDA, selain bias menjamin kelangsungan pendidikan anak-anak (miskin), juga sekaligus dapat mendongkrak mutu pendidikan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, berikut akan dipaparkan hasil survey yang dilakukan kepada 225 siswa dari berbagai sekolah yang ada di Kota Surabaya, baik dari jenjang SD, SMP hingga SMA.

Sengaja dalam survei ini diwawancarai langsung kepada para siswa, karena dalam proses penyelenggaraan pendidikan, para siswa inilah yang sesungguhnya menjadi subyek pendidikan.

2.1. Profil Siswa

Jumlah keseluruhan siswa yang menjadi responden penelitian ini sebanyak 225 siswa. Mereka berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari

SD hingga SMA. Jumlah sekolah yang menjadi lokasi penelitian adalah 5 SD, 5 SMP dan 5 SMA yang tersebar di berbagai kecamatan di Kota Surabaya. Semua sekolah berstatus sekolah negeri dan memiliki akreditasi B dan A.

Dari segi status sosial-ekonomi, sebagian besar siswa yang diteliti termasuk bukan siswa miskin (75,8%). Dari 225 siswa yang diteliti, hanya 24,4% yang termasuk kategori siswa miskin. Berbeda dengan BLT atau beasiswa yang khusus

Identitas Siswa (N=225)

Jenis kelamin	Laki-laki	34,2%
	Perempuan	65,8%
Kelas	4-6	33,3%
	7-9	33,3%
	10-12	33,3%
Ranking dalam setahun terakhir	Tidak ranking	45,3%
	1	8,4%
	2	8,0%
	3	6,2%
	4	7,6%
	5	7,1%
	>5	17,3%
Status sosial ekonomi siswa	Termasuk siswa miskin	24,4%
	Bukan siswa miskin	75,8%

Dari segi jenis kelamin, sebanyak 65,8% merupakan siswa putri dan 34,2% merupakan siswa putra atau laki-laki. Untuk jenjang SD, siswa yang diwawancarai berasal dari Kelas 4 hingga Kelas 6 (33,3%), berasal dari Kelas 7 hingga Kelas 9 sebanyak 33,3%, dan berasal dari Kelas 10-12 sebanyak 33,3%. Sengaja dalam studi ini dipilih siswa dari berbagai jenjang dengan pertimbangan dapat diperoleh data yang lebih bervariasi. Khusus untuk siswa jenjang SD, sengaja hanya dibatasi siswa Kelas 4-6, sebab diasumsikan untuk siswa Kelas 4 SD ke atas sudah memiliki pengetahuan dan respons yang memadai ketika mereka diminta beropini tentang berbagai hal seputar pelaksanaan BOPDA di sekolahnya.

diberikan kepada siswa miskin, untuk program BOPDA umumnya memang diberikan kepada seluruh siswa melalui sekolah. Jadi, baik siswa miskin maupun tidak miskin, semua adalah target sasaran dari Program BOPDA, yang intinya tidak hanya bertujuan untuk menjamin kelangsungan pendidikan anak, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di berbagai sekolah.

Tentang prestasi siswa, dalam studi ini hampir separuh (45,3% siswa yang diwawancarai termasuk siswa yang biasa-biasa saja. Dalam arti mereka bukan merupakan siswa yang termasuk 5 atau 10 besar di kelasnya. Dari 225 siswa, sebanyak 8,4% merupakan siswa yang memiliki prestasi menonjol, yakni dalam setahun terakhir pernah menduduki peringkat

ranking 1 di kelasnya, dan sebanyak 8% merupakan siswa dengan prestasi ranking 2 di kelasnya. Sebanyak 17,3% merupakan siswa yang memiliki ranking 6-10 di kelasnya.

2.2. Efektivitas dan Manfaat BOPDA

Secara teoritis, proses pengajaran dan pendidikan di sekolah dan di kelas seyogianya selalu didukung suasana pendidikan yang kondusif. Artinya, yang namanya kegiatan belajar bukan sekadar siswa duduk dan mendengar apa yang diajarkan guru, melainkan yang terpenting adalah bagaimana siswa bisa merasa *kerasan* dan nyaman untuk belajar. Merasa *kerasan* dan nyaman di sini berarti merasa aman, bebas, berkembang sesuai dengan kemampuannya (Suparno dkk., 2002: 65). Seperti dikatakan Ki Supriyoko

(2002), salah satu faktor kesuksesan belajar dan keberhasilan pendidikan ditentukan sejauhmana ketersediaan dari apa yang disebut sebagai sarana *hardware* atau perangkat kerasnya, antara lain ruang belajar, peralatan praktek, laboratorium, perpustakaan dan lain sebagainya.

Dengan dukungan Program BOPDA, salah satu hasil yang diharapkan adalah siswa dapat memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana belajar yang memadai. Dengan diberlakukan kebijakan otonomi sekolah dan pemberian kewenangan bagi sekolah untuk merencanakan kebutuhannya sendiri, maka diharapkan sekolah akan dapat menentukan hal-hal apa saja yang menjadi kebutuhan peserta didik, dan kemudian merealisasikannya dengan dukungan dana BOPDA.

Tabel 4
Perubahan, Perbaikan Sarana dan Prasarana Apa Saja yang Dirasakan Warga Sekolah Dalam Satu Tahun Terakhir BOPDA Diterima

Sarana dan prasarana	Perubahan dan perbaikan		
	Membaik	Sama saja	Memburuk
1. Ruang kelas	58.2%	32.4%	9.3%
2. Ruang guru	68.0%	29.8%	2.2%
3. Ruang kepala sekolah	63.1%	35.1%	1.8%
4. Perpustakaan	58.7%	35.1%	6.2%
5. WC/Kamar mandi siswa	41.8%	40.4%	17.8%
6. WC/kamar mandi guru	36.4%	49.3%	14.2%
7. Laboratorium bahasa	49.8%	41.3%	8.9%
8. Laboratorium IPA	39.6%	41.3%	19.1%
9. Sarana olahraga	56.9%	33.4%	9.8%
10. Kantin sekolah	57.3%	33.8%	8.9%
11. Halaman sekolah	63.6%	29.8%	6.7%
12. Kursi siswa	48.0%	41.8%	10.2%
13. Meja siswa	46.2%	43.6%	10.2%
14. UKS	66.7%	29.8%	3.6%

Tanpa didukung fasilitas yang memadai dan suasana belajar yang menyenangkan, sulit kita berharap kegiatan pembelajaran bisa berlangsung dengan maksimal, bahkan tidak mustahil yang terjadi adalah hal-hal yang kontra-produktif. Bisa dibayangkan, apa yang bakal terjadi jika siswa terpaksa belajar di ruang kelas yang tidak layak, bising, dan panas dan kotor. Suasana gerah, selain membuat siswa tidak nyaman, niscaya akan membuat mereka juga kesulitan untuk dapat berkonsentrasi dengan baik menyimak materi pelajaran.

Di berbagai sekolah yang menjadi lokasi sampel penelitian lapangan, meskipun separuh lebih (58,2%) siswa mengaku kondisi ruang kelas sudah tergolong memadai. Tetapi, untuk sekolah-sekolah tertentu, terutama sekolah yang ada di wilayah pinggiran dan sekolah non-favorit, kondisi ruang kelas, bangku dan kursi siswa, kondisi ruang dan koleksi perpustakaan, sarana olah raga, dan terutama laboratorium IPA umumnya masih kurang memadai, dan bahkan jauh dari layak -walaupun dalam beberapa kasus tidak sedikit siswa telah merasakan perbaikan. Berbeda dengan sekolah favorit dan swasta unggulan yang memiliki fasilitas belajar yang lengkap, di sekolah-sekolah pinggiran yang sederhana, umumnya siswa harus puas belajar dengan fasilitas yang seadanya. Alih-alih kondisi ruang kelas siswa makin baik, dalam kenyataan justru ada 9,3% siswa yang mengaku kondisi ruang kelasnya makin memburuk.

Dibandingkan dengan ruang guru, di mata siswa ruang belajar atau ruang kelas yang ada di sekolahnya umumnya tidak

banyak mengalami perubahan. Untuk ruang guru, menurut 68% siswa dikatakan dalam setahun terakhir cenderung makin membaik. Hanya 2,2% siswa yang menyatakan kondisi ruang guru makin bertambah buruk. Sementara itu, untuk ruang kelas, hanya 58,2% siswa yang menyatakan kondisinya membaik.

Di antara berbagai fasilitas belajar di sekolah, yang paling banyak dikeluhkan siswa terutama adalah kondisi laboratorium IPA, WC/kamar mandi siswa, dan kursi serta meja belajar siswa. Sebanyak 19,1% siswa menyatakan bahwa kondisi laboratorium IPA dalam setahun terakhir justru makin memburuk dan tidak layak bagi siswa.

Di antara berbagai sarana dan prasarana yang ada di sekolah, menurut para siswa yang diteliti, yang mengalami perubahan dan perbaikan cukup signifikan umumnya adalah ruang guru (68%), ruang Kepala Sekolah (63,1%), UKS (66,7%), kondisi halaman sekolah (63,6%), ruang kelas (58,2%), kantin sekolah (57,3%), perpustakaan (58,7%) dan sarana olahraga (56,9%).

Untuk kondisi perpustakaan, bagi kota besar seperti Surabaya sebetulnya agak ironis jika kondisi perpustakaan sekolah yang ada ternyata tidak banyak mengalami perbaikan. Walaupun separuh lebih perpustakaan sekolah dinilai siswa makin membaik, namun cukup banyak siswa (35,1%) yang menilai bahwa kondisi perpustakaan sekolah yang ada ternyata tidak berkembang, dan bahkan ada 6,2% siswa yang menilai kondisi perpustakaan yang ada di sekolahnya justru makin memburuk.

Meski tidak selalu apa yang dikatakan siswa di atas merupakan realitas yang terjadi di lapangan, namun bagaimanapun harus diakui bahwa dukungan Program BOPDA bagi sekolah tampaknya lebih signifikan pada perbaikan fasilitas untuk guru, Kepala Sekolah dan fasilitas sekolah daripada fasilitas yang berkaitan dan bisa diakses langsung oleh siswa, seperti meja-kursi siswa dan ruang kelas.

2.3. Kondisi Alat Peraga Mengajar

Untuk menjelaskan materi pelajaran seorang guru tidak cukup hanya mengandalkan penjelasan oral atau penjelasan lisan semata. Penjelasan materi dengan menggunakan metode ceramah murni tanpa alat peraga sangat mungkin sebagian siswa akan kesulitan menerima isi materinya. Sebaliknya kalau materi pelajaran yang diberikan oleh guru diikuti dengan alat peraga akan memudahkan siswa menangkap isi pelajarannya. Apakah kondisi alat peraga untuk mengajar di

berbagai sekolah di Kota Surabaya dalam setahun terakhir telah dirasakan siswa makin membaik?

Secara umum, dari data yang diperoleh, kondisi alat peraga mengajar di berbagai sekolah di Surabaya bisa dikatakan telah mengalami perbaikan. Namun demikian, arah penekanan perbaikan alat peraga mengajar tampaknya lebih berorientasi pada perbaikan pada aspek perangkat teknologi informasi daripada perbaikan alat peraga dasar, seperti ketersediaan peta, duplikat tengkorak, bola dunia dan gambar anatomi tubuh.

Salah satu alat peraga yang biasanya dipakai guru untuk mengajar khususnya pelajaran IPA atau biologi, misalnya adalah duplikat tengkorak. Meski menurut sepertiga siswa (30,7%) kondisi duplikat tengkorak di sekolahnya membaik, namun sebagian besar siswa (47,1%) menyatakan kondisinya sama saja, dan bahkan sebanyak 22,2% siswa menilai kondisinya makin memburuk.

Tabel 5
Kondisi Alat Peraga Mengajar Yang Ada Dalam Setahun Terakhir

Alat peraga	Perubahan dan perbaikan		
	Membaik	Sama saja	Memburuk
1. Papan tulis	52.9%	39.5%	7.6%
2. LCD	68.9%	25.8%	5.3%
3. Komputer	84.0%	10.7%	5.3%
4. Peta ruang kelas	36.4%	53.8%	9.8%
5. Duplikat tengkorak	30.7%	47.1%	22.2%
6. Gambar anatomi tubuh manusia/hewan/tumbuhan	43.6%	46.7%	9.8%
7. Bola dunia	38.2%	53.8%	8.0%
8. Peralatan olah raga (bola, matras, dll)	57.3%	32.0%	10.7%
9. Koleksi buku di perpustakaan	57.8%	34.7%	7.6%

Alat peraga lainnya untuk membantu mengajar biasanya berupa gambar-gambar yang menunjang sekaligus membantu seorang guru menyampaikan materi pelajarannya sehingga mudah diterima dan dimengerti siswanya. Peta, misalnya, seringkali dibutuhkan dan perlu dipasang di dinding ruang kelas untuk memudahkan siswa belajar geografi atau bidang ilmu lain yang berkaitan. Tetapi, yang memprihatinkan, studi evaluasi ini menemukan hanya 36,4% siswa yang menilai kondisinya makin membaik. Sebanyak 53,8% siswa menyatakan kondisinya sama saja, dan bahkan sebanyak 9,8% siswa menilai kondisi peta di ruang kelasnya makin buruk.

Selain peta, alat peraga belajar lain yang menurut siswa tidak banyak mengalami perbaikan adalah replika bola dunia. Seperti juga kondisi peta, studi ini menemukan bahwa sebagian besar siswa (53,8%) umumnya menilai kondisi bola dunia yang ada di kelasnya umumnya tidak mengalami perbaikan, dan bahkan sebanyak 8% siswa justru menilai kondisinya lebih buruk. Hanya 38,2% siswa yang menilai kondisi bola dunia yang ada di ruang kelasnya makin membaik.

Di era perkembangan teknologi informasi yang makin canggih, perbaikan alat peraga belajar yang menonjol umumnya adalah komputer dan LCD. Dari 225 siswa yang diteliti, hampir semua (84%) menyatakan bahwa kondisi komputer di sekolahnya dalam setahun terakhir mengalami perbaikan atau membaik. Demikian pula untuk fasilitas LCD, sebanyak 68,9% siswa menyatakan

kondisinya makin membaik. Di sejumlah sekolah yang diteliti, memang diakui siswa bahwa sebagian guru umumnya sudah menggunakan komputer dan LCD sebagai alat bantu untuk menjelaskan materi yang dibahas di kelas. Bahkan, tidak hanya menayangkan definisi atau konsep-konsep, dalam pemanfaatan komputer dan LCD umumnya para guru juga menampilkan gambar atau film yang relevan dengan materi pelajaran yang disampaikan.

2.4. Kompetensi Guru

Selain *hardware* seperti ruang belajar, atau laboratorium, faktor penentu keberhasilan pendidikan dan proses belajar lainnya adalah perangkat pikir atau *brainware* (Ki Supriyoko, 2002). Ki Supriyoko menjelaskan bahwa yang termasuk *brainware* adalah guru, kepala sekolah, anak didik atau siswa dan orang-orang yang terkait di dalam proses pendidikan itu sendiri.

Banyak orang berpendapat bahwa dari sejumlah faktor—*hardware*, *software* dan *brainware*— yang paling menentukan keberhasilan pendidikan dan proses belajar mengajar ada di tangan guru. Kendati ruang belajar amat sederhana, kondisi perpustakaan dan laboratorium amat menggenaskan, tetapi masih ada guru yang baik dan bertanggungjawab maka masih ada harapannya. Sebaliknya, kendati ruang belajar amat bagus dan nyaman karena dilengkapi AC, perpustakaan serba lengkap dan laboratororium lengkap dengan sejumlah peralatan prakteknya tetapi bila tidak ada guru maka jangan harap proses belajar mengajar dan pendidikan berjalan secara optimal.

Meski demikian bukan berarti peran guru dalam proses belajar mengajar menjadi titik sentralnya. Dalam model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) penekanan ditujukan kepada pembelajaran aktif, efektif dan menyenangkan. Berangkat dari konsep ini maka posisi guru tidak lagi sebagai pihak yang paling tahu sementara siswa berada pada pihak yang harus menerima saja transfer pengetahuan dan ketrampilan. Dalam model MBS posisi guru hanya sebagai fasilitator yang dinamik dan kreatif. Karena posisi seperti ini maka guru diharapkan menggunakan pendekatan dan strategi pembelajaran atau mengatur kelas dengan banyak variasi. Selain itu guru juga dituntut untuk dapat menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dengan cara misalnya setiap proses belajar mengajar selalu berupaya menyiapkan dan menggunakan alat peraga dan penunjang lainnya. Dengan demikian suasana kelas dapat tercipta yang benar-benar menyenangkan.

menyatakan bahwa kualitas guru di sekolah mereka cenderung makin baik. Hanya 6,2% siswa yang menilai kualitas guru dalam mengajar makin memburuk. Sementara itu, sebanyak 29,8% siswa menyatakan kualitas guru dalam mengajar relatif sama saja.

Sejumlah siswa yang diwawancarai secara mendalam menyatakan bahwa saat ini, sebagian guru yang mengajar di sekolahnya dinilai makin baik. Guru tidak lagi sekadar mengajar dan memberi catatan kepada siswa, tetapi para guru umumnya telah menyadari dan melakukan reposisi untuk lebih memerankan diri sebagai fasilitator, dan mengajar dengan cara yang lebih atraktif. Diakui sejumlah siswa, bahwa pemanfaatan alat peraga mengajar, seperti komputer dan LCD telah membuat proses belajar-mengajar menjadi lebih menyenangkan (*joyfull learning*) dan menarik.

Memang, menurut informasi yang diperoleh masih ada beberapa guru yang

Tabel 6
Penilaian Siswa Terhadap Kompetensi Guru Mengajar Dalam Setahun Terakhir

Kompetensi guru	Perubahan dan perbaikan		
	Membaik	Sama saja	Memburuk
1. Kualitas mengajar	64.0%	29.8%	6.2%
2. Buku rujukan yang dipakai	46.2%	40.9%	12.9%
3. Materi yang disampaikan	59.6%	32.9%	7.6%
4. Tingkat kehadiran guru di kelas	63.6%	29.3%	7.1%

Meski tidak semua guru dinilai siswa memiliki kompetensi dan kualitas yang baik dalam mengajar. Namun, paling-tidak dalam setahun terakhir telah memperlihatkan indikasi bahwa kualitas guru-guru yang ada cenderung membaik. Dari 225 siswa yang diwawancarai, 64%

mengajar dengan cara “kuno”, lebih banyak memperlakukan siswa layaknya bejana kosong dan memberi siswa catatan yang sama persis dengan buku diktat atau buku pelajaran yang ada. Tetapi, guru semacam ini menurut siswa makin lama cenderung makin sedikit. Studi ini menemukan

separuh lebih siswa (59,6%) menyatakan bahwa dari materi yang disampaikan guru di kelas, dalam setahun terakhir juga makin membaik atau makin berkualitas. Hanya 7,1% siswa yang menyatakan bahwa proses belajar-mengajar di kelas, terutama ketika guru menyampaikan materi pelajaran dinilai makin memburuk.

Tentang buku rujukan yang dipakai guru mengajar, walau belum terlalu memperlihatkan kemajuan yang signifikan. Namun, hampir separuh siswa (46,2%) menyatakan bahwa dalam setahun terakhir cenderung membaik. Yang dimaksud membaik di sini, menurut siswa adalah ketika guru dalam mengajar tidak hanya mengandalkan satu buku pegangan wajib dan menyampaikan hanya isi buku itu saja kepada siswa, melainkan guru yang bersangkutan telah bersedia mencari dan mengembangkan sendiri buku pelajaran lain sebagai penunjang, sehingga materi pelajaran yang disampaikan, termasuk soal-soal yang dibahas di kelas menjadi lebih beragam.

Sejumlah siswa yang di luar sekolah mengaku les di beberapa LBB (Lembaga Bimbingan Belajar) yang terkenal menyatakan bahwa mereka sedikit-banyak mengetahui mana soal yang berbobot dan mana soal yang biasa-biasa saja. Di mata mereka, seorang guru yang berkualitas biasanya mampu mengajar dan mengerjakan soal-soal tertentu yang kualitasnya sama seperti soal yang mereka pelajari di LBB. Seorang guru yang hanya berpedoman pada satu buku wajib, menurut siswa tidak mungkin bisa mengeksplorasi dan memaparkan variasi soal dan kedalaman materi yang bermutu.

Di sejumlah sekolah yang diteliti, selain menyangkut buku rujukan yang dipakai guru, salah satu persoalan lain yang dinilai siswa masih membutuhkan perbaikan adalah menyangkut intensitas kehadiran guru di kelas. Meski mayoritas (63,6%) siswa menilai tingkat kehadiran guru di kelas dalam setahun terakhir cenderung membaik, namun sebanyak 29,3% siswa menilai kondisinya sebetulnya masih sama saja. Bahkan, sebanyak 7,1% siswa menilai tingkat kehadiran guru di kelas belakangan ini makin memburuk.

Memang, kalau siswa menyatakan tingkat kehadiran guru di kelas memburuk tidak harus dimengerti bahwa guru yang bersangkutan membolos atau tidak masuk ke kelas. Dengan alasan rapat, menurut siswa ada guru tertentu yang terkadang meninggalkan ruang kelas dan tidak mengajar. Tetapi, yang lebih dipersoalkan para siswa sebenarnya adalah adanya perilaku guru yang seolah-olah hadir di kelas, tetapi dalam kenyataan tidak mengajar –kecuali hanya memberi siswa catatan yang harus disalin atau menugaskan siswa untuk mengerjakan soal-soal tertentu hingga jam belajar selesai.

2.5. Permasalahan yang Timbul

Dengan disalurkannya bantuan dana melalui pelaksanaan Program BOPDA, idealnya semua sekolah tidak lagi membebani wali murid dengan kewajiban untuk membayar biaya operasional sekolah, karena semua telah ditanggung dan dibiayai dari dana BOPDA. Tetapi, dalam kenyataan dan dengan berbagai dalih, tidak sedikit siswa mengaku bahwa

selama ini mereka umumnya telah harus membayar dan mengeluarkan sejumlah dana tambahan tertentu untuk uang gedung, uang pratikum, daftar ulang, dan lain sebagainya.

orang tua siswa membayar dana-dana tambahan itu dengan sukarela karena diakui memang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran proses belajar-mengajar putra-putri mereka. Namun

Tabel 7
Iuran Atau Pungutan yang Masih Harus Dibayar Siswa Dalam Setahun Terakhir

Jenis Pungutan	Ya	Tidak
1. Uang gedung	44.0%	56.0%
2. Uang daftar ulang	29.8%	70.2%
3. Uang ekstrakurikuler	10.7%	89.3%
4. Uang fotocoy bahan ajar	27.6%	72.4%
5. Uang seragam sekolah	45.3%	54.7%
6. Uang seragam olahraga	38.2%	61.8%
7. Uang tambahan les	8.9%	91.1%
8. Uang praktikum	21.3%	78.7%

Dari 225 siswa yang diwawancarai, studi ini menemukan bahwa hampir separuh siswa (44%) umumnya masih mengeluarkan dana tambahan dan harus membayar uang gedung kepada sekolah yang jumlahnya bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga satu atau jutaan rupiah lebih. Selain uang gedung, menurut para siswa yang diwawancarai biaya lain yang cukup banyak dikeluarkan wali murid adalah uang seragam sekolah (45,3%), uang seragam olahraga (38,2%), uang daftar ulang (29,8%), uang pratikum (21,3%), uang foto copy bahan ajar (27,6%), uang ekstrakurikuler (10,7%), dan uang tambahan les (8,9%).

Diakui sejumlah siswa yang diteliti, bahwa seluruh dana tambahan yang dikeluarkan orang tuanya untuk membayar uang seragam, daftar ulang, uang pratikum dan lain-lain itu bukanlah hasil paksaan dari sekolah atau karena tekanan dari pihak guru. Artinya, para

demikian, sebagian siswa yang diwawancarai ada pula yang sebetulnya agak mengeluhkan adanya tambahan dana itu, karena dalam persepsi mereka jika sekolah telah memperoleh kucuran dana BOPDA, seharusnya semua keperluan untuk biaya operasional sekolah tidak lagi ditarik dari siswa. Beberapa siswa yang pernah membaca berita di media massa menyatakan bahwa jika sekolah menilai dana BOPDA masih belum mencukupi untuk menanggung semua kebutuhan belajar siswa, maka sudah menjadi tugas sekolah untuk meminta tambahan dan memperjuangkannya ke Pemerintah Kota Surabaya.

3. Kesimpulan

BOPDA sesungguhnya adalah salah satu wujud komitmen dan upaya yang dikembangkan Pemerintah Kota Surabaya untuk ikut berperan dalam menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin dan

sekaligus meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah.

Secara umum, pelaksanaan program BOPDA di Kota Surabaya telah berjalan relatif baik. Dalam arti, alokasi dana BOPDA di berbagai sekolah telah dimanfaatkan sesuai kebutuhan sekolah, dan para siswa pun umumnya telah merasakan terjadinya perubahan yang makin membaik, tidak hanya dalam ketersediaan sarana dan prasarana belajar, tetapi juga kualitas dan kompetensi guru dalam mengajar.

Namun demikian, dalam beberapa bagian harus diakui bahwa pelaksanaan program BOPDA di sejumlah sekolah umumnya belum sepenuhnya berjalan efektif. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan telah berhasil mengidentifikasi beberapa persoalan yang timbul di lapangan sehubungan dengan efektifitas pelaksanaan program BOPDA. Secara garis besar, beberapa permasalahan yang terjadi selama proses pelaksanaan program BOPDA di Kota Surabaya adalah:

1. Akibat pengaturan alokasi dana BOPDA yang terlalu rigid dan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan riil sekolah, seringkali pihak sekolah mengalami kesulitan dalam mengeluarkan anggaran BOPDA, sehingga tidak jarang ada kegiatan sekolah yang tidak bisa didanai, dan bahkan ada kegiatan penting sekolah yang terkadang terpaksa dihilangkan, karena nomor rekening peruntukan dana BOPDA sudah dipatok terlebih dahulu.

2. Dalam proses pencairan dana BOPDA seringkali terlambat dari jadwal yang seharusnya diterima sekolah, sehingga tidak sedikit sekolah yang terpaksa harus utang atau pinjam terlebih dahulu ke pihak lain untuk menalangi kebutuhan biaya operasional sekolah. Di samping itu, ketentuan pencairan dana BOPDA yang diatur harus sama untuk masing-masing triwulan, seringkali juga tidak sesuai dengan kebutuhan riil sekolah, sehingga menyulitkan bagi pihak sekolah ketika mereka harus mengaur pengalokasiannya sesuai kebutuhan riil di lapangan.
3. Sekolah acapkali kesulitan dalam membuat SPJ pertanggungjawaban pemanfaatan dana BOPDA bukan karena hanya kode rekening yang terlalu rigid, akan tetapi juga karena beberapa hal, seperti keterpaksaan dalam menyesuaikan dengan kode rekening dan juga kurangnya tenaga yang ahli yang dimiliki sekolah dalam bidang akuntansi. Di Kota Surabaya, seperti diketahui Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah umumnya adalah tenaga profesional dalam bidang pendidikan dan tidak banyak tahu tentang pengelolaan keuangan, belum lagi mereka juga harus merangkap mengajar dan mengelola keuangan, terutama di jenjang SD. Kendati tidak selalu terjadi, tetapi secara tidak langsung dampak dari keharusan Kepala Sekolah harus membagi waktu antara mengajar dan urusan administratif, sedikit-banyak akan menimbulkan dampak terhadap

- penurunan kualitas pendidikan.
4. Penentuan besaran dana BOPDA yang didasarkan pada jumlah siswa, seringkali menyulitkan pihak sekolah, terutama sekolah RSBI karena di satu sisi mereka dituntut harus meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi di sisi yang lain mereka menerima alokasi dana BOPDA yang lebih kecil akibat jumlah siswa yang diterima juga lebih sedikit.
 5. Bagi sekolah RBSI, mulai tahun depan (2011) alokasi dana bantuan dari pusat dalam bentuk *block grant* akan dihentikan karena sudah tiga tahun berjalan, sehingga ada kekhawatiran sekolah RSBI ini mulai tahun depan akan menghadapi berbagai masalah berkaitan dengan berkurangnya dana bantuan yang diterima sekolah. Hanya dengan mengandalkan dana BOS dan BOPDA, besar kemungkinan sekolah RSBI ini akan kesulitan jika dituntut dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolahnya karena tidak didukung dengan dana yang memadai.
 6. Untuk sekolah khusus, seperti SMK yang memiliki jurusan khusus dengan jumlah siswa yang sedikit, seringkali mereka tidak mungkin hanya mengandalkan dukungan dana BOS dan BOPDA, karena kebutuhan riil untuk membiayai guru-guru GTT jauh lebih besar. Di salah satu SMK yang memiliki jurusan pendalangan dengan jumlah siswa hanya 3 orang, sementara guru yang mengajar sebanyak 16 orang, tentu tidak mungkin kebutuhan biaya operasionalnya bisa dipenuhi sekadar mengandalkan dana BOPDA.
 7. Proses pengurusan SPJ yang sulit dan memakan waktu memiliki dampak yang *multi effect* di sekolah, tidak hanya pada kualitas pendidikan yang menurun namun juga seringkali terlambatnya penyampaian SPJ itu sendiri ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
 8. Dalam proses sosialisasi petunjuk teknis dan pelaksanaan BOPDA, pihak atau wakil sekolah yang hadir sebagian besar adalah Kepala Sekolah.
 9. Meski sebagian besar guru menilai alokasi dana BOPDA yang diterima sekolah sudah cukup memadai untuk membiayai kebutuhan operasional sehari-hari sekolah. Namun, tidak sedikit guru (33,3%) yang menilai dana BOPDA yang diterima sekolah sebetulnya masih kurang sesuai dengan kebutuhan operasional sekolah. Secara umum, alokasi dana BOPDA yang diterima sekolah ditengarai hanya mampu mencukupi tidak lebih dari sekitar 50 persen kebutuhan riil sekolah.
 10. Bagi sekolah RSBI maupun sekolah pinggiran yang memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang masih jauh dari layak, kebutuhan riil dan kebutuhan operasional sekolah umumnya tidak bisa dipenuhi hanya dengan mengandalkan dana BOPDA.
 11. Di berbagai sekolah, proses perencanaan alokasi dana BOPDA umumnya bukan hanya melibatkan Kepala Sekolah dan guru saja, tetapi

- juga telah melibatkan Komite Sekolah (86,7%) dan bahkan siswa (40%). Namun demikian, peran Komite Sekolah dalam proses penyusunan RKBS dinilai masih belum maksimal, dan bahkan tidak sedikit pihak sekolah yang mengeluhkan bahwa keberadaan Komite Sekolah justru menghambat proses penyusunan RKBS.
12. Dalam proses penyusunan rencana kegiatan belanja sekolah (RKBS), tidak sedikit pihak sekolah yang mengaku mengalami kesulitan untuk menetapkan alokasi anggaran yang tepat dan sesuai kebutuhan peserta didik.
 13. Di berbagai sekolah, pemanfaatan sebagian besar dana BOPDA umumnya adalah untuk pemeliharaan gedung dan fasilitas sekolah, pengadaan ATK dan peningkatan mutu tenaga kependidikan dan pendidik, serta untuk pengadaan sarana dan prasarana belajar.
 14. Di berbagai sekolah di Kota Surabaya tidak pernah terjadi pemotongan dana BOPDA yang diterima sekolah.
 15. Kesulitan yang dihadapi sekolah dalam proses pemanfaatan BOPDA terutama adalah ketika terjadi perubahan harga antara pengajuan proposal dengan harga ketika pelaksanaan program, dan kesulitan ketika sekolah harus mencari rekanan pelaksana proyek yang benar-benar baik.
 16. Di berbagai sekolah, pelaksanaan program BOPDA secara umum telah memberikan hasil yang cukup

menggembirakan. Kondisi sarana dan prasarana di sekolah dalam setahun terakhir diakui siswa membaik. Namun demikian, di antara berbagai sarana dan prasarana yang ada di sekolah, menurut para siswa yang diteliti, yang mengalami perubahan dan perbaikan cukup signifikan umumnya adalah ruang guru (68%), ruang Kepala Sekolah (63,1%), UKS (66,7%), kondisi halaman sekolah (63,6%), ruang kelas (58,2%), kantin sekolah (57,3%), perpustakaan (58,7%) dan sarana olahraga (56,9%). Sedangkan, di antara berbagai fasilitas belajar di sekolah, yang paling banyak dikeluhkan siswa terutama adalah kondisi laboratorium IPA, WC/kamar mandi siswa, perpustakaan, dan kursi serta meja belajar siswa. Sebanyak 19,1% siswa menyatakan bahwa kondisi laboratorium IPA dalam setahun terakhir justru makin memburuk dan tidak layak bagi siswa. Walaupun separuh lebih perpustakaan sekolah dinilai siswa makin membaik, namun cukup banyak siswa (35,1%) yang menilai bahwa kondisi perpustakaan sekolah yang ada ternyata tidak berkembang, dan bahkan ada 6,2% siswa yang menilai kondisi perpustakaan yang ada di sekolahnya justru makin memburuk.

17. Secara umum, kondisi alat peraga mengajar di berbagai sekolah di Surabaya bisa dikatakan telah mengalami perbaikan. Namun demikian, arah penekanan perbaikan alat peraga mengajar tampaknya lebih

berorientasi pada perbaikan pada aspek perangkat teknologi informasi daripada perbaikan alat peraga belajar yang elementer, seperti ketersediaan peta, duplikat tengkorak, bola dunia dan gambar anatomi tubuh.

18. Meski tidak semua guru dinilai siswa memiliki kompetensi dan kualitas yang baik dalam mengajar. Namun, paling-tidak dalam setahun terakhir telah memperlihatkan indikasi bahwa kualitas guru-guru yang ada cenderung membaik dan guru juga telah memberi kesempatan siswa untuk lebih aktif berpartisipasi di kelas.
 19. Dengan disalurkannya bantuan dana melalui pelaksanaan Program BOPDA, idealnya semua sekolah tidak lagi membebani wali murid dengan kewajiban untuk membayar biaya operasional sekolah, karena semua telah ditanggung dan dibiayai dari dana BOPDA. Tetapi, dalam kenyataan dan dengan berbagai dalih, tidak sedikit siswa mengaku bahwa selama ini mereka umumnya telah harus membayar dan mengeluarkan sejumlah dana tambahan tertentu untuk uang gedung, uang pratikum, daftar ulang, dan lain sebagainya.
2. Perlu dilakukan perubahan kode rekening pada BOPDA agar bisa menjadi lebih sederhana dan fleksibel, dengan tujuan agar masing-masing sekolah bisa mengembangkan program/kegiatan yang lebih kontekstual dan lebih mudah dalam melakukan realisasi anggaran BOPDA.
 3. Perlu adanya jaminan proses pencairan dana BOPDA yang benar-benar sesuai jadwal, agar pihak sekolah tidak dibebani untuk mencari dana talangan alternatif. Alasan perlunya proses pengurusan penerbitan SK Walikota dan waktu untuk pembahasan di DPRD, hendaknya tidak menjadi dalih untuk memperlambat proses pencairan dana BOPDA yang pada akhirnya akan membebani dan menyebabkan pihak sekolah harus mengorban kepentingan terbaik peserta didik.
 4. Perlu dipertimbangkan adanya alokasi dana khusus bagi sekolah tertentu yang memiliki kondisi/kultur yang spesifik, seperti SMK Kejuruan, RSBI atau sekolah pinggiran yang membutuhkan dukungan dana lebih banyak.
 5. Perlu penambahan alokasi dana BOPDA bagi sekolah, karena pemberian dana BOPDA sesungguhnya tidak hanya untuk membiayai kebutuhan operasional sehari-hari sekolah, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana sekolah dapat memperoleh dukungan dana yang bisa dialokasikan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Di samping itu,

4. Rekomendasi

1. Dalam proses penyusunan RKBS, patokan utama yang seyogianya dipertimbangkan sekolah adalah "kepentingan terbaik" peserta didik. Artinya, apapun program atau kegiatan yang diusulkan, seyogianya dikalkulasi sejauhmana manfaatnya bagi kepentingan siswa.

- penambahan alokasi dana BOPDA bagi sekolah juga perlu dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tarikan atau beban iuran tambahan bagi siswa/wali murid.
6. Perlu dikembangkan dan diperbanyak pelatihan pengelolaan dan pelaporan BOS/BOPDA untuk sekolah penerima BOS/BOPDA, agar pihak sekolah memiliki SDM yang benar-benar memadai/expert dalam proses penyusunan usulan anggaran dan pelaporan pemanfaatan BOS/BOPDA. Untuk jenjang SD, bahkan jika memungkinkan perlu dilakukan penambahan tenaga administrasi khusus yang bisa membantu penanganan manajemen BOS/BOPDA.
 7. Untuk membantu proses penyusunan usulan program dan pelaporan pemanfaatan BOPDA, termasuk mempermudah proses monitoringnya, ada baiknya jika Dinas Pendidikan mengembangkan e-BOS/BOPDA yang bisa dimanfaatkan pihak sekolah untuk memperlancar proses penyusunan, pelaporan dan pengawasan BOS/BOPDA.
 8. Perlu ditingkatkan hubungan kemitraan yang lebih baik antara sekolah (Kepala Sekolah dan guru) dan Komite Sekolah, agar kedua belah pihak ini mampu mengembangkan hubungan kolegial yang lebih produktif -dengan mengacu pada satu kepentingan bersama, yakni kepentingan terbaik peserta didik.
 9. Selain untuk mendorong peningkatan penyediaan fasilitas teknologi informasi bagi siswa dan kegiatan belajar-mengajar, alokasi dana BOPDA seyogianya juga diberikan secara memadai untuk memperbaiki mutu layanan perpustakaan sekolah.
 10. Perlu dijajagi dan dikaji kembali adanya wacana yang memungkinkan bagi pihak sekolah untuk mencari/menarik dana pendidikan tambahan dari masyarakat, sepanjang ada jaminan bahwa dana yang ditarik itu benar-benar dikelola untuk kepentingan terbaik siswa dan dilaporkan secara transparan kepada publik (*).

Daftar Pustaka

- Bastian, Aulia Reza., 2002. *Reformasi Pendidikan*. Yogyakarta: LAPPERA Pustaka Utama.
- Budiono, 1997. *Pendidikan dan Perubahan Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Budiono, 1998. *Dampak Krisis Ekonomi dan Moneter Terhadap Pendidikan*. Jakarta: Pusat penelitian Sains dan Teknologi Lembaga Penelitian UI.
- Chan, Sam M & Tuti T. Sam. 2005. *Analisis SWOT, Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Drost, J. 2005. *Dari KBK Sampai MBS, Essai-Essai Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

- Darmaningtyas, 1999. *Pendidikan Pada dan Setelah Krisis: Evaluasi Pendidikan di Masa krisis*. Yogyakarta: Kerjasama LPIST dan Pustaka Pelajar.
- Hariadi, Sri Sanituti & Bagong Suyanto (eds.), 2001. *Anak-anak yang Dilanggar Haknya: Potret Sosial Anak Rawan di Indonesia yang membutuhkan Perlindungan Khusus*. Kerjasama Pusat Kajian Anak FISIP Unair, LPA Jatim, dan UNICEF.
- Inkeles, Alex dan Larry J. Diamond, "Personal Development and National Development: A Cross-National Perspective," dalam *The Quality of Life: Comparative Studies*, ed. Alexander Szalai dan Frank M. Andrews, London: Sage Publications, 1980.
- Inglehart, Ronald "The Renaissance of Political Culture," *American Political Science Review* 82 (Desember 1988).
- Jiyono & Runtini, 2000. *Menuju Manajemen Berbasis Sekolah di Tingkat Pendidikan Dasar*. Jakarta: UNESCO-UNICEF-DPDIKBUD.
- Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi, 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Jakarta: Bappenas, Depdiknas, dan Adicita.
- Kasim, Ifhdal dan Arus, Johannes da Masenus, 2001. *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: ELSAM.
- Kuntoro dkk., 1996. *Beberapa Faktor yang mempengaruhi Putus Sekolah Siswa Wanita di Sekolah Dasar dan Lanjutan Tingkat Pertama di Beberapa Desa di Jawa Timur*. Kerjasama BKKBN, UNFPA, dan Pusat Penelitian Kependudukan dan Pembangunan Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.
- Kartono, St., 2002. *Menebus Pendidikan yang Tergadai: Catatan Reflektif Seorang Guru*. Yogyakarta: Galang Press.
- Muslim, Faesol dkk., 2000. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan*. Jakarta: UNESCO-UNICEF-Pemerintah RI.
- Robinson, Philip, 1986. *Beberapa Perspektif Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali.
- Ronisef, Sjafnir dkk (eds.). *Mengurai Benang Kusut Pendidikan: Gagasan Para Pakar Pendidikan*. Jogjakarta: Transformasi UNJ bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- Suderadjat, Hari. 2004. *Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Pembaharuan Pendidikan Dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003*. Bandung: Cipta Cemas Grafika.
- Suyanto, Bagong dkk., 1997. *Profil Pendidikan dan Penyusunan program Penanganan Anak Putus Sekolah di Desa IDT Propinsi Jawa Timur*. Kerjasama FISIP Universitas Airlangga dengan Bappeda Propinsi Dati I Jawa Timur.
- Supriadi, Dedi, 1999. *Jaring Pengaman Sosial Pendidikan: Model Pengelolaan yang Ideal, Kunci-Kunci Keberhasilan Komite, dan Fungsi Terapi Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Sindhunata (ed.), 2000. *Membuka Masa Depan Anak-Anak Kita: Mencari Kurikulum Pendidikan Abad XXI*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sularto, St., 2000. *Seandainya Aku Bukan Anakmu*. Jakarta: KOMPAS Bekerjasama dengan World Vision Indonesia.

- Soebakir, Soepriono & Achmad Sapari, 2001. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Kerjasama Pemerintah RI, UNESCO dan UNICEF.
- Suparno, Paul dkk. , 2002. *Reformasi Pendidikan: Sebuah Rekomendasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Syarief, Ikhwanuddin & Dodo Murtadlo (eds), 2002. *Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru: 70 Tahun Prof. Dr. HAR Tilaar, M.Sc.Ed*. Jakarta: Grasindo.
- Widiastono, Tonny D. (ed.), 2004. *Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta: Kerjasama Kompas dan Yayasan Toyota & Astra.
- _____, 1994. *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia II: Kurikulum Untuk Abad ke-21*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- _____, 2000. *Challenges for a New Generation. The Situation of Children and Women in Indonesia 2000*. UNICEF dan Pemerintah RI.
- _____, 2005. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama.
- _____, 2005. *Standar Nasional Pendidikan*. Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama.

Vol. 2
No. 02

AGUSTUS 2010

TOPIK UTAMA

EVALUASI PELAKSANAAN BOPDA DI KOTA SURABAYA

Septi Ariadi

PROBLEMA BIDANG PENDIDIKAN

DI WILAYAH KEPULAUAN KABUPATEN SUMENEP

Bagong Suyanto

KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DI ERA

DESENTRALISASI PENDIDIKAN

Rahma Sugihartati

ENTERTAINMENISASI SEKOLAH, PSB DINI,

HINGGA *PARENTING TEST*

Drs. Jidi, M.Si.

GAGASAN

PENDIDIKAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF DURKHEIMIAN

Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si.

ADAM SMITH DAN PERSPEKTIF LIBERAL

DALAM PENDIDIKAN

Dra. Sudarmi

SKILLED LABOUR DALAM KONTEKS TKI

Sam Abede Pareno

PENDIDIKAN MORAL DAN KETELADANAN

Kusmin

KAJIAN

KEPEKAAN SISWA TERHADAP PERSOALAN LINGKUNGAN

Sari Oktafiana, S.Sos

ESSAY

AKAL SEHAT SEPUTAR PENDIDIKAN GRATIS

Sinung D. Kristanto

